

Rekrutmen Politik Calon Kepala Daerah (Studi Tentang Seleksi Kandidat Pada Partai Amanat Nasional Pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya Tahun 2017)

Teguh Anggoro¹, Yanyan M Yani², Widya Setiabudi³, Muradi⁴

^{1,2,3,4}Mahasiswa Pascasarjana FISIP Universitas Padjajaran

goeh_an77@yahoo.co.id

Diterima: 29-03-2020, Disetujui: 20-05-2020, Dipublikasikan: 22-07-2020

Abstract: *Recruitment of regional head candidates is part of the political process within the internal party facing the General Election. Candidate selection is a "secret garden" for each party, besides the easy selection process by other powers outside political parties. This study answers the research question "What is the method of selection in the political recruitment of regional head candidates by the National Mandate Party in the General Election in Tasikmalaya City 2017". This study attempts to review, analyze candidate selection. The theory used is the theory of candidate selection from Rahat (2001). The results of this study indicate that the election in PAN is determined by party elites. Selection is also superior by the strength of "local strongmen" and large financials. The process of selecting candidates in the PAN shows a degree of semi-democracy. The selection of PAN internal cadres is not a qualified cadre who is not qualified, but the selection process of candidates approved by local strongmen, and great financial strength.*

Keywords: *Political Parties, Political Recruitment, Candidate Selection, Elections.*

Abstrak: Rekrutmen calon kepala daerah merupakan bagian dari proses politik di internal partai dalam menghadapi Pemilukada. Seleksi kandidat merupakan "secret garden" bagi setiap partai, selain itu proses seleksi terkadang mudah dipengaruhi oleh kekuatan lain di luar partai politik. Penelitian ini untuk menjawab pertanyaan penelitian "Bagaimana metode seleksi dalam rekrutmen politik calon kepala daerah oleh Partai Amanat Nasional pada Pemilukada di Kota Tasikmalaya 2017". Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, menganalisis seleksi kandidat. Teori yang digunakan adalah teori seleksi kandidat dari Rahat (2001). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa seleksi pada PAN ditentukan oleh elit partai. Seleksi juga dipengaruhi oleh kekuatan "local strongman" dan financial yang besar. Proses seleksi kandidat pada PAN menunjukkan derajat semi demokratis. Tidak terpilihnya kader internal PAN bukan disebabkan kader yang maju tidak berkualitas, akan tetapi proses seleksi kandidat dipengaruhi oleh local strongman, dan kekuatan financial yang besar.

Kata Kunci: Partai Politik, Rekrutmen Politik, Seleksi Kandidat, Pemilu.

Pendahuluan

Pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) secara langsung yang tengah berlangsung hampir di seluruh penjuru tanah air, merupakan suatu langkah maju dalam berdemokrasi. Setelah berhasil menyelenggarakan Pemilu Nasional 2004 dengan damai dan demokratis, bangsa Indonesia kemudian melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah langsung (Pilkada) mulai 2005¹. Proses ini layak mendapatkan dukungan semua pihak terutama warga masyarakat yang merupakan pemilik kedaulatan sesungguhnya. Apapun hasilnya dan bagaimana kualitasnya, sebagai bangsa yang masih belajar berdemokrasi (*beginner in democracy*), harus diterima dengan penuh besar hati oleh semua komponen bangsa dengan tidak menyampingkan usaha-usaha perbaikan dan evaluasi untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah ke depan.

Pemilukada adalah suatu bentuk perwujudan demokrasi langsung dalam memilih kepala daerah. Dalam hal ini peran rakyat diberikan secara luas untuk menentukan sendiri atau memilih kepala daerah sesuai dengan keinginan masing-masing individu. Setiap partai akan mengambil keputusan, pada saat menjelang pemilihan kepala daerah, ini menunjukkan eksistensi partai politik yang merupakan bagian dari demokrasi. Jauh hari sebelum tahapan pemilukada, partai politik membuka penjangkaran calon, baik dari internal partai atau dari luar partai untuk calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati/Wakil Bupati dan calon Walikota/Wakil Walikota. Rekrutmen merupakan pola hubungan antara si kandidat dan partai politik. Bagaimana setiap orang mempersiapkan diri sehingga dapat diterima oleh partai politik, seperti yang diungkapkan oleh Norris dan Lovenduski, pola rekrutmen terbentuk atas hubungan antara ketersediaan kandidat yang mencari karir politik dan proses seleksi yang ditetapkan oleh partai politik.²

Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh partai-partai politik dan dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk sekaligus sebagai faktor pendorong (*driven factor*) bagi praktek demokrasi yang baik pada suatu negara. Rekrutmen berkaitan dengan sejauh mana partai politik melakukan seleksi, kandidasi, dan menyiapkan kader-kader politik untuk memimpin negara dan pemerintahan yang bersih, anti korupsi, berintegritas, akuntabel, dan dapat dipercaya.

Dalam proses rekrutmen politik seharusnya individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Rekrutmen politik merupakan fungsi yang sangat penting bagi partai politik.³ Fungsi rekrutmen ini menjadi fungsi eksklusif partai politik dan tidak mungkin ditinggalkan oleh partai politik. Ia menjadi monopoli dan fungsi abadi partai politik. Schattschneider dalam Norris menyatakan jika partai politik gagal melakukan fungsi ini, maka ia berhenti menjadi partai politik.⁴ Sedangkan menurut Firmanzah Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan sebagai pencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya, perlu proses pendidikan baik yang bersifat

¹ Valina Singka Subekti, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga Ke Praktik Pemerintah Demokrasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

² Syamsuddin Haris, 'Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia', *Jakarta: KPK-LIPI*, 2016.

³ Okky Singgih Laksono Waskita Aji and Lita Tyesta A L W Hasyim Asy'ari, 'Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012', *Diponegoro Law Journal*, 5.4 (2016), 1-13.

⁴ Richard S Katz and William J Crotty, *Handbook of Party Politics* (Sage, 2006).

formal maupun non-formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi dan partai politiklah yang paling bertanggungjawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi, dan kaderisasi politik⁵.

Tahapan rekrutmen juga ditentukan siapa yang akan menyeleksi, bagaimana seleksi harus dilakukan (metode seleksi) dan bagaimana cara memutuskannya.⁶ Proses rekrutmen adalah hal yang paling penting dari fungsi partai politik, karena hasilnya akan berdampak secara signifikan secara politik, misalnya: (1) dapat mempengaruhi dinamika internal partai politik, termasuk menciptakan konflik internal partai; (2) dapat mempengaruhi komposisi anggota di dalam lembaga eksekutif dan legislatif, dan (3) akuntabilitas anggota terpilih di dalam lembaga eksekutif dan legislatif.⁷

Seleksi kandidat di internal parpol adalah saudara kembar dari pemilihan umum yang diikuti oleh parpol. Demokrasi memiliki makna yang universal, baik di tingkatan sistem politik, maupun di tingkatan internal parpol. Pada satu sisi, partai politik berkompetisi dalam pemilu yang demokratis. Pada sisi yang lain, parpol melakukan proses kandidasi secara internal. Dengan demikian, proses kandidasi dan pemilihan umum juga harus diperlakukan sama.⁸

Pada Pemilu Kota Tasikmalaya tahun 2017, Partai Amanat Nasional (PAN) mengajukan calon walikota dan wakil walikota Tasikmalaya dari luar kader partai, padahal pada proses rekrutmen terdapat kader DPD PAN Kota Tasikmalaya yang ikut mendaftar dan ikut dalam proses seleksi di internal partai. Akan tetapi kedua orang tersebut, yaitu H Hendro (Ketua MPP DPD PAN Kota Tasikmalaya), dan Ustad Miftah Fauzi (Ketua DPD PAN Kota Tasikmalaya) tidak mendapatkan rekomendasi dari DPP PAN. Rekomendasi diberikan pada kader di luar PAN yaitu H Dede (Incumben wakil Walikota) dan dr Asep (dokter di RSUD Kota Tasikmalaya). Terpilihnya H Dede yang merupakan kader PPP masih dianggap tepat karena dia merupakan incumben wakil walikota Tasikmalaya, dan sudah lama bergelut di partai politik. Sedangkan terpilihnya dr Asep sepertinya sangat dipengaruhi oleh kekuatan di luar partai politik. Melihat penjelasan di atas maka peneliti memiliki anggapan bahwa tingkatan demokrasi internal partai berbanding lurus dengan keterpilihan kandidat calon kepala daerah. Semakin demokratis suatu partai maka akan memilih kandidat yang berkualitas karena lembaga penyeleksi yang berkualitas dan menjalankan proses seleksi yang benar.

Penelitian ini penting diteliti karena mengisi celah penelitian rekrutmen dan seleksi kandidat. Penelitian ini menjawab rumusan masalah 1). Bagaimana metode seleksi dalam rekrutmen politik calon kepala daerah oleh Partai Amanat Nasional pada Pemilu di Kota Tasikmalaya 2017. 2). Bagaimana demokrasi internal partai dilihat dari metode seleksi kandidat. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis metode seleksi yang dilakukan oleh PAN saat melaksanakan kandidasi pada Pemilu tahun 2017 di Kota Tasikmalaya, Jawa Barat.

⁵ Ph D Firmanzah, 'Mengelola Partai Politik' (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm, 2011).

⁶ S H Muntoha, 'Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemerintahan Yang Multi Partai Di Indonesia Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis', 2018.

⁷ Muntoha.

⁸ Giawa Analius, 'PROSES SELEKSI INTERNAL CALON LEGISLATIF PARTAI NASDEM DI DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA', *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (Jurnal Pemerintahan Daerah Dan Desa Indonesia (JPD2I))*, 1.1 (2017), 21-37.

Metode

Penelitian ini dilakukan di kota Tasikmalaya Jawa Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan studi fenomenologi yaitu studi yang berusaha mencari “esensi” makna dari suatu fenomena, jenis penelitian bersifat deskriptif–analisis, yaitu menggambarkan fenomena sosial politik yang diteliti, kemudian menganalisis dengan mengklasifikasikan dan mengkategorikan berdasarkan data-data yang diperoleh.

Proses penelitian kualitatif ini melibatkan upaya-upaya penting seperti mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang spesifik dari para partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema khusus ke tema-tema umum dan menafsirkan makna data. Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah pada metode seleksi PAN dalam menentukan bakal calon kepala daerah di Kota Tasikmalaya tahun 2017.

Hasil dan Pembahasan

Sejauh ini studi tentang rekrutmen politik kepala daerah yang telah dilakukan, beberapa di antaranya fokus pada tiga aspek. *Pertama*, faktor internal partai politik, di mana elite partai memainkan peran penting dalam rekrutmen seperti pada penelitian yang mengatakan bahwa pimpinan partai memegang peran kunci dalam rekrutmen politik.⁹ *Kedua*, faktor eksternal partai politik, menggambarkan pada pola rekrutmen berdasarkan uang, kedekatan elite, dan ikatan primordial. Selain itu melihat bahwa momentum karier kepala daerah tergantung pada politisasi keluarga mereka.¹⁰

Studi-studi terdahulu, memperlihatkan bahwa kajian rekrutmen politik kepala daerah penting untuk diteliti. Penelitian ini penting dibuat karena mengisi celah kosong penelitian tentang rekrutmen politik dilihat dari sudut seleksi kandidat. Fokus penelitian ini adalah lebih menekankan analisis pada rekrutmen politik melalui seleksi kandidat (Rahat dan Hazan, 2001)

Partai Politik

Kajian tentang partai politik merupakan salah satu bidang yang paling penting dan menarik dalam ilmu politik. Kajian tentang partai politik dikembangkan oleh para pakar sejak kuartal ketiga abad ke 19.¹¹ Pada periode ini terdapat beberapa kajian tentang partai politik, terutama sebagai jawaban/respons terhadap cepatnya perkembangan peranan partai politik di pemerintahan.¹² Di akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, perkembangan baru terjadi ketika kajian tentang partai politik mulai membahas partai sebagai organisasi ekstra-parlementer. Seiring perkembangan zaman lambat laun partai politik sudah mengarah pada partai modern, dengan mengembangkan manajemen organisasi.

⁹ Alexander Hertel-Fernandez, ‘American Employers as Political Machines’, *The Journal of Politics*, 79.1 (2017), 105–17.

¹⁰ Baitur Rohman, M Syahri, and Nurul Zuriah, ‘Fenomena Disharmonisasi Partai Politik Berbasis Islam Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kota Malang’, *Jurnal Civic Hukum*, 4.2 (2019), 91–102.

¹¹ RIDHO AL-HAMDI, *Moving towards a Normalised Path: Political Islam in Contemporary Indonesia* (Muhammadiyah University Yogyakarta, 2017).

¹² N F N Efriza, ‘Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]’, *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10.1 (2019), 17–38.

Partai politik modern, ini merupakan suatu era di mana permulaan bidang kajian di era modern. Kajian tentang partai politik berlanjut dengan berbagai fokus baru kajian dan melahirkan lebih banyak teori yang lebih maju yang dikembangkan oleh para pakar. Pokok bahasan mulai berkembang seperti Ideologi, pemerintahan, budaya politik, sosiologi politik, perkembangan politik dan demokrasi, hubungannya dengan sistem politik dan partai politik, serta kelembagaan.¹³ Pada umumnya berbagai kajian tentang politik di negara-negara berkembang cenderung sangat terkait dengan pembahasan tentang berbagai masalah spesifik seperti demokratisasi, ideologi, dan sejumlah kajian baru tentang sistem partai dan kelembagaan.¹⁴

Demokrasi Internal Partai

Dalam penentuan calon pejabat publik, diperlukan mekanisme yang demokratis. Partai politik yang merupakan bagian dari sistem politik harus dapat menjalankan mekanisme pemilihan dengan demokratis. Mengapa demikian ? karena dengan menjalankan proses yang demokratis maka akan dihasilkan calon pejabat yang merupakan pilihan rakyat, dan memiliki legitimasi yang tinggi dari anggota partai tersebut. Bukan legitimasi dari pimpinan partai.

Sampai dengan saat ini, seleksi calon mendapatkan perhatian yang relatif sedikit. Kondisi ini disebabkan oleh kelangkaan literatur ilmiah telah menimbulkan hambatan bagi peneliti. Menurut Galaghar dan marsh¹⁵ tentang seleksi calon menyebutnya sebagai “taman rahasia” politik. Selain menjadi tahap penting dalam proses perekrutan, seleksi calon juga merupakan arena penting bagi perebutan kekuasaan internal partai. Prosedur untuk mengklasifikasikan metode seleksi calon dalam rekrutmen politik diuraikan pada empat kriteria yaitu selektorat, pencalonan, desentralisasi, dan voting versus penunjukan.¹⁶

Seleksi Kandidat

Rekrutmen politik adalah suatu proses seleksi anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan administratif maupun politik (Gaffar, 1999: 155). Kedua, Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Prosedur untuk mengklasifikasikan metode seleksi calon dalam rekrutmen politik diuraikan pada empat kriteria yaitu selektorat, pencalonan, desentralisasi, dan voting versus penunjukan.¹⁷

1. Selektorat

Selektorat merupakan badan yang menyeleksi calon, hal ini merupakan aktor perantara penting dalam proses perekrutan selektorat dapat dapat beranggotakan satu orang atau banyak orang hingga seluruh pemilih dalam suatu bangsa tertentu. Reuven Hazan menggambarkan lima jenis proses seleksi kandidat antara dua kontinum inklusif di satu sisi dan eksklusif di sisi yang lain. Kelima proses seleksi kandidat tersebut adalah

¹³ Iwan Hardi Saputro, ‘MODERNISASI PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Dan Kabupaten Purworejo)’, *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7.2 (2016), 5–20.

¹⁴ Fernando Casal Bértoa, ‘Political Parties or Party Systems? Assessing the ‘Myth’ of Institutionalisation and Democracy’, *West European Politics*, 40.2 (2017), 402–29.

¹⁵ Michael Gallagher and Michael Marsh, *Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics* (Sage Publications Ltd, 1988), xviii.

¹⁶ Paul Pennings and Reuven Y Hazan, ‘Democratizing Candidate Selection: Causes and Consequences’, *Party Politics*, 7.3 (2001), 267–75.

¹⁷ Pennings and Hazan.

pertama; seleksi yang dilakukan oleh pemilih (*voters*), *kedua*; seleksi yang dilakukan oleh anggota partai, *ketiga*; seleksi yang dilakukan oleh delegasi partai, *keempat*; seleksi oleh elite partai, dan *kelima*; seleksi oleh pimpinan partai.

Atas dasar perspektif teori Hazan secara umum dapat dibedakan dua kecenderungan pola rekrutmen, yakni inklusif dan eksklusif. Rekrutmen inklusif melibatkan publik dan atau pemilih, sedangkan rekrutmen eksklusif hanya melibatkan anggota, pengurus, dan pimpinan partai. Dalam upaya melembagakan sistem rekrutmen yang terbuka dan demokratis, maka seleksi calon pejabat publik semestinya melibatkan publik, selain keterlibatan para anggota, pengurus, pimpinan partai. Ketika selektorat adalah lembaga partai, kita menemukan pada tengah kontinum. Di dalam partai, ukuran relatif masing-masing lembaga adalah tanda inklusivitasnya. Ujung ekstrim dari kutub eksklusif didefinisikan oleh selektorat yang terdiri dari satu individu.

2. Pencalonan

Pencalonan membahas pertanyaan tentang siapa yang dapat menampilkan dirinya sebagai calon dari partai tertentu. Sekali lagi dapat ditempatkan sebuah kontinum dari inklusif ke eksklusif. Pada salah satu ujung, kutub inklusif, setiap pemilih berhak untuk tampil sebagai calon partai. Pada kutub eksklusif ditemukan serangkaian syarat ketat.

3. Desentralisasi

Metode seleksi partai dapat dilihat sebagai desentralisasi dalam dua pengertian. Desentralisasi bisa bersifat teritorial, yakni ketika selektorat partai lokal mencalonkan calon partai. Misalnya seorang pemimpin lokal, komite cabang partai, atau semua anggota partai atau pemilih disuatu daerah pemilihan. Desentralisasi metode seleksi juga bersifat fungsional, yang memastikan keterwakilan bagi perwakilan kelompok seperti serikat buruh, serikat perempuan atau minoritas.

Kesalahan umum dalam studi yang membahas metode seleksi adalah menganggap desentralisasi dan inklusivitas dan sentralisasi serta eksklusivitas secara konseptual sama, atau setidaknya menggambarkan dimensi metode seleksi calon yang sama. Namun secara analitis keduanya berbeda. Desentralisasi bisa berarti bahwa kontrol atas seleksi calon beralih dari oligarki nasional ke oligarki lokal. Sebagai contoh, jika selektorat terdesentralisasikan dari konferensi partai nasional yang terdiri atas ribuan peserta ke sepuluh komite lokal yang masing-masing terdiri dari beberapa orang komite lokal yang masing-masing terdiri dari beberapa orang aktivis dan pemimpin, secara keseluruhan selektorat telah terdesentralisasi, namun belum menjadi lebih inklusif dan sebenarnya telah menjadi lebih eksklusif.

4. Voting versus penunjukan

Biasnya terjadi bahwa dalam selektorat yang lebih kecil dan lebih eksklusif calon diangkat, sementara selektorat besar biasanya melakukan voting untuk memilih calon mereka. Namun, sistem pemungutan suara secara teoritis dapat digunakan dalam selektorat yang terdiri dari dua orang atau lebih, dan penunjukan dapat dilakukan dalam lembaga yang terdiri dari puluhan orang. Ketika proses seleksi mencakup suatu prosedur yang dengannya voting menentukan apakah seseorang dinyatakan sebagai calon partai dalam pemilu, dan/ atau posisinya pada daftar, kita dihadapkan dengan prosedur pemungutan suara.

Demokratisasi Seleksi Kandidat

Menjelang Pemilu di Kota Tasikmalaya tahun 2017, PAN membuka pendaftaran untuk umum guna merekrut calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Metode seleksi yang dilakukan oleh PAN terdiri atas beberapa tahap antara lain: *Tahap Pertama*. Pendaftaran dan verifikasi di DPD. Pada tahap ini PAN membuka pendaftaran

kepada umum, dua kali pendaftaran dan menjaring sembilan nama, dua dari internal partai dan tujuh nama dari luar kader PAN.

Tahap kedua. Pada tingkat DPW. Tim selektorat menjalankan wawancara dengan kandidat, wawancara kandidat seputar masalah riwayat hidup dan kekuatan financial untuk menghadapi pemilukada. Tidak ada hal spesifik lain yang ditanyakan oleh tim selektorat DPW selain seputar financial. Dari proses tersebut memunculkan anggapan bahwa yang terpilih dapat dipastikan kandidat yang memiliki financial yang kuat. Jika berbicara kandidat berfinancial kuat di antara ke enam orang yang mengikuti proses kandidasi (Eri Purnomohadi, Dede Sudrajat, Diky Chandranegara, Hendro, Nanang Nurjamil dan dr Asep) maka dua orang kandidat Dede Sudrajat dan dr Asep yang santer muncul karena keduanya memiliki financial yang kuat. Dede Sudrajat adalah pemilik Bus Budiman, dan dr Asep didukung oleh kakak iparnya, yaitu H Aming yang merupakan bagian dari keluarga Mayasari Group dan sebagai pemilik Bus Primajasa.

Tahap ketiga. Pada tahap ketiga ini seleksi dilakukan oleh tim pilkada pusat, dan melakukan seputar pengecekan terkait administrasi yang dikumpulkan di DPD dan wawancara. DPP hanya memanggil untuk wawancara pada bakal calon yang memiliki elektabilitas dan financial yang besar yaitu H Dede, Diky Chandranegara dan dr Asep.¹⁸ Dari mereka diperoleh informasi bahwa wawancara seputar strategi pemenangan dan kekuatan financial pendukung pemilukada. Wawancara di DPP lebih terfokus pada kekuatan financial setiap kandidat, ini dapat diartikan bahwa DPP mencari kandidat yang memiliki kekuatan financial untuk memenangkan pemilukada.

Proses seleksi dilakukan dari mulai tingkat DPD hingga DPP PAN, akan tetapi pemberi putusan akhir proses kandidasi adalah DPP PAN, dalam hal ini adalah elit DPP PAN. Merekalah yang dominan dalam pengambilan keputusan. Artinya kandidat manapun yang memiliki kedekatan dengan elit pusat maka kecenderungan untuk terpilih semakin besar¹⁹.

Pada akhirnya keputusan rapat pleno DPP PAN memutuskan bahwa H Dede Sudrajat dan dr Asep sebagai calon resmi dari DPP PAN untuk kontestasi pemilukada di Kota Tasikmalaya tahun 2017. Dari putusan tersebut terlihat kalau seleksi kandidat pada PAN sangat dipengaruhi oleh kekuatan dari luar partai. Hal ini dipertegas dengan terpilihnya dr Asep sebagai calon wakil walikota. Bagaimana bisa seorang yang tidak terkenal dan belum pernah terjun dalam politik justru yang terpilih/terekrut oleh PAN.

Terpilihnya dr Asep oleh PAN dapat dijelaskan dengan analisis berikut ini. 1). Dr Asep didorong kuat oleh H Aming (pengusaha Oto Bus Primajasa), di mana istri dr Asep merupakan adik dari H Aming. Dan tidak perlu dipungkiri lagi, semenjak pemilukada tahun 2007 di Kota Tasikmalaya, H Aming selalu mendukung salah satu kandidat, seperti pada tahun 2012, H Aming mendukung pasangan pemenang Pemilukada (Budi-Dede). 2). Dr Asep dan H Aming memiliki kekuatan financial yang besar yang digunakan untuk memuluskan menjadi kandidat calon wakil walikota dari PAN. 3) H Aming melakukan gerilya politik, baik di DPD hingga DPP PAN, dan langkah ini cukup efektif untuk menundukan elit DPD hingga DPP PAN.

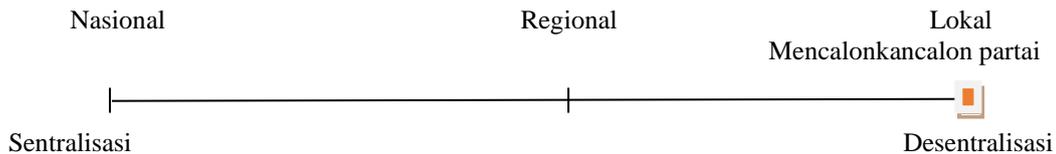
Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa seleksi kandidat di Partai Amanat Nasional sangat dipengaruhi oleh dua kekuatan di luar partai yaitu *local strong man* dan financial yang besar. "*Local strong man*" dalam hal ini adalah H Aming, sedangkan kekuatan financial yang besar berasal juga dari H Aming.

¹⁸Wawancara dengan H Hendro, bakal calon dari DPD PAN, di Tasikmalaya, tanggal 9 januari 2019.

¹⁹Wawancara dengan H Hendro, Ketua MPP DPD PAN Kota Tasikmalaya, di Tasikmalaya tanggal 9 januari 2019.

Desentralisasi, diartikan sebagai kontrol atas seleksi calon beralih dari oligarki nasional ke oligarki lokal. Desentralisasi dapat diartikan sebagai desentralisasi teritorial, dan desentralisasi metode seleksi. Desentralisasi teritorial artinya ketika selektorat mencalonkan calon partai. Desentralisasi metode seleksi adalah memastikan keterwakilan bagi perwakilan kelompok. Akan tetapi dalam penelitian ini akan melihat desentralisasi teritorial. Pada pelaksanaannya PAN membuka kepada umum proses rekrutmen kepala daerah. Di sini terlihat bahwa selektorat daerah/lokal mampu mencalonkan calon dari daerah yaitu warga yang mencalonkan diri. Artinya terlihat bahwa desentralisasi di jalankan oleh PAN.

Gambar 2.
Desentralisasi di PAN



Sumber : hasil olahan peneliti tahun 2019

Voting versus Penunjukan. Terdapat metode dalam menentukan calon pada proses seleksi pada partai politik. Bisa melalui voting atau dilihat dari jumlah suara terbesar yang memilih, atau penunjukan artinya ditunjuk oleh pimpinan partai politik. Jika melihat pada model yang dilakukan oleh PAN pada pemilukada di Kota Tasikmalaya terlihat bahwa peran dari elit partai yang menentukan saat seleksi di tingkat daerah hingga pusat. Elit partai menunjuk bakal calon yang diajukan dari daerah. Artinya tidak ada voting yang dilakukan oleh selektorat pada tingkat pusat untuk menentukan siapa calon yang dipilih oleh partai politik.

Dengan demikian secara keseluruhan dapat diambil kesimpulan. *Pertama*, Pola seleksi yang dilakukan oleh PAN secara keseluruhan terkonsentrasi pada elit partai politik. *Kedua*, longgarnya sistem seleksi dalam rekrutmen politik, berdampak pada mudahnya hasil dipengaruhi oleh orang yang berkepentingan. *Ketiga*, Pola seleksi yang dilakukan oleh PAN dalam rekrutmen politik belum menunjukkan demokratisasi di internal partai politik secara keseluruhan.

Dari empat dimensi metode seleksi, hanya dua yang terpenuhi unsur demokratisnya, yaitu pada pencalonan di mana dibuka terhadap umum, dan pada desentralisasi di mana selektorat lokal dapat mencalonkan calon dari daerah. Sedangkan pada dimensi selektorat masih terlihat dikontinum tengah di mana yang menentukan terpilihnya para calon adalah elit partai. Pada dimensi voting dan penunjukan terlihat bahwa PAN melakukan penunjukan terhadap calon kepala daerah pada proses kandidasi. Dengan demikian kesimpulan secara umum rekrutmen calon kepala daerah pada PAN termasuk pada katagori semi demokrasi.

Tabel 1
Tabel Metode Seleksi PAN Kota Tasikmalaya

No		
1	Penentu Kebijakan	Elit partai (rapat pleno)
2	Sumber Rekrutmen	Kader dan non kader
3	Tim Seleksi/selektorat	Pengurus partai yang dipilih/berada di kontinum tengah (tidak demokratis)
4	Pencalonan	Di buka untuk umum (demokratis)
5	Desentralisasi	Mencalonkan dari daerah/lokal (demokratis)
6	Voting versus penunjukan	Penunjukan (tidak demokratis)

Sumber : hasil olahan peneliti tahun 2019.

Kader Internal Kalah dari Kader Eksternal

Tidak diajukannya kader internal sebagai calon kepala daerah oleh PAN pada saat pemilukada di Kota Tasikmalaya tahun 2017 menjadi pertanyaan bagi banyak orang, sehingga memunculkan spekulasi kalau PAN tidak memiliki kader yang potensial untuk dijadikan calon dari partainya. Bahkan memunculkan spekulasi yang lain, kalau uang yang mengatur proses rekrutmen pada kedua partai ini. Padahal PAN memiliki kader yang potensial untuk menang seperti H Hendro (Ketua MPP PAN Kota Tasikmalaya).

Pada Partai Amanat Nasional tidak terpilihnya kader internal dikarenakan 1) Kekuatan *local strong man* turut dalam mengalahkan calon internal PAN 2) Calon dari internal yang mendaftarkan diri pada proses rekrutmen di PAN tidak memiliki elektabilitas 3) Kekuatan financial yang besar dari kader luar mempengaruhi keterpilihan mereka oleh DPP PAN 4) Tidak ada loby politik yang dilakukan oleh kader internal PAN dalam memenangkan kontestasi bakal calon kepala daerah. Jika melihat beberapa alasan di atas tidak terpilihnya kader internal PAN karena kuatnya pengaruh orang luar yang memainkan politik di internal PAN. Dengan lobi yang kuat dimulai dari DPD hingga DPP PAN dan didorong financial yang besar akhirnya rekomendasi jatuh pada kader eksternal PAN. Selain itu tidak terpilihnya kader internal karena mereka tidak aktif untuk melobi hingga ke DPP, dikarenakan rasa minder yang disebabkan tidak adanya kekuatan financial yang dimilikinya, walaupun kader dari PAN sangat mumpuni jika dilihat dari kualitas kandidat. Akhirnya dapat disimpulkan bahwa kekuatan *local strong man* dan financial yang besar menjadi faktor pendorong terpilihnya kader eksternal

Kesimpulan

Tidak terpilihnya kader internal PAN bukan disebabkan kader yang maju tidak berkualitas, akan tetapi proses seleksi kandidat dipengaruhi oleh *local strong man*, dan kekuatan financial yang besar. Hal ini berimplikasi pada terpilihnya pasangan Dede-Asep oleh DPP PAN. Dari segi seleksi kandidat menunjukkan bahwa pada Partai Amanat Nasional, keputusan penentuan bakal calon kepala daerah ada pada rapat pleno pusat, ini menunjukkan partai ini berifat elitis non prosedural. Tidak ada prosedur yang baku dalam pelaksanaan rekrutmen politik. Proses seleksi di PAN masih memperlihatkan lemahnya demokrasi di partai tersebut.

Dari empat dimensi metode seleksi, hanya dua yang terpenuhi unsur demokratisnya, yaitu pada pencalonan di mana dibuka terhadap umum, dan pada desentralisasi di mana selektorat lokal dapat mencalonkan calon dari daerah. Sedangkan pada dimensi selektorat masih terlihat dikontinum tengah di mana yang menentukan

terpilihnya para calon adalah elit partai. Pada dimensi voting dan penunjukan terlihat bahwa PAN melakukan penunjukan terhadap calon kepala daerah pada proses kandidasi. Secara umum rekrutmen calon kepala daerah pada PAN termasuk pada kategori semi demokrasi. Hal ini berimplikasi pada kandidat kepala daerah yang terpilih.

Daftar Pustaka

- Aji, Okky Singgih Laksono Waskita, and Lita Tyesta A L W Hasyim Asy'ari, 'Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012', *Diponegoro Law Journal*, 5.4 (2016), 1–13
- AL-HAMDI, RIDHO, *Moving towards a Normalised Path: Political Islam in Contemporary Indonesia* (Muhammadiyah University Yogyakarta, 2017)
- Analius, Giawa, 'PROSES SELEKSI INTERNAL CALON LEGISLATIF PARTAI NASDEM DI DEWAN PIMPINAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA', *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (Jurnal Pemerintahan Daerah Dan Desa Indonesia (JPD2I))*, 1.1 (2017), 21–37
- Casal Bértoa, Fernando, 'Political Parties or Party Systems? Assessing the 'Myth' of Institutionalisation and Democracy', *West European Politics*, 40.2 (2017), 402–29
- Efriza, N F N, 'Eksistensi Partai Politik Dalam Persepsi Publik [The Existence of The Political Parties in Public Perception]', *Jurnal Politica Dinamika Masalah Politik Dalam Negeri Dan Hubungan Internasional*, 10.1 (2019), 17–38
- Firmanzah, Ph D, 'Mengelola Partai Politik' (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Hlm, 2011)
- Gallagher, Michael, and Michael Marsh, *Candidate Selection in Comparative Perspective: The Secret Garden of Politics* (Sage Publications Ltd, 1988), xviii
- Haris, Syamsuddin, 'Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal Di Indonesia', *Jakarta: KPK-LIPI*, 2016
- Hertel-Fernandez, Alexander, 'American Employers as Political Machines', *The Journal of Politics*, 79.1 (2017), 105–17
- Katz, Richard S, and William J Crotty, *Handbook of Party Politics* (Sage, 2006)
- Muhtadi, Burhanuddin, *Populisme, Politik Identitas, Dan Dinamika Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Demokrasi Prosedural* (Intrans Publishing, 2019)
- Muntoha, S H, 'Penguatan Sistem Presidensial Dalam Pemerintahan Yang Multi Partai Di Indoneasia Guna Mewujudkan Pemerintahan Yang Demokratis', 2018
- Pennings, Paul, and Reuven Y Hazan, 'Democratizing Candidate Selection: Causes and Consequences', *Party Politics*, 7.3 (2001), 267–75

- Rohman, Baitur, M Syahri, and Nurul Zuriyah, 'Fenomena Disharmonisasi Partai Politik Berbasis Islam Pada Pemilihan Umum 2019 Di Kota Malang', *Jurnal Civic Hukum*, 4.2 (2019), 91–102
- Saputro, Iwan Hardi, 'MODERNISASI PARTAI POLITIK DI TINGKAT LOKAL (Studi Kasus Partai Demokrat Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Dan Kabupaten Purworejo)', *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 7.2 (2016), 5–20
- Subekti, Valina Singka, *Dinamika Konsolidasi Demokrasi: Dasri Ide Pembaruan Sistem Politik Hingga Ke Praktik Pemerintah Demokrasi* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015)